

Perempuan dan Lahan Gambut

Catatan Jurnal Perempuan Perempuan dan Lahan Gambut

Artikel

Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan
Myrna Asnawati Safitri

Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau
Catharina Indirastuti

Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Enik Maslahah

Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut
Taqiuddin Ibnu Syihab, Yustina Ambarini Murdiningrum, Lukas Rumboko Wibowo

Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah
Nur Iman Subono, Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Diterbitkan oleh:

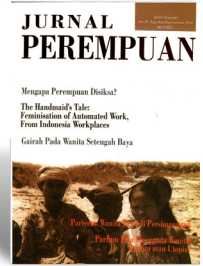


Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- ☐ SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- ☐ SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- ☐ SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- ☐ SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- ☐ SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

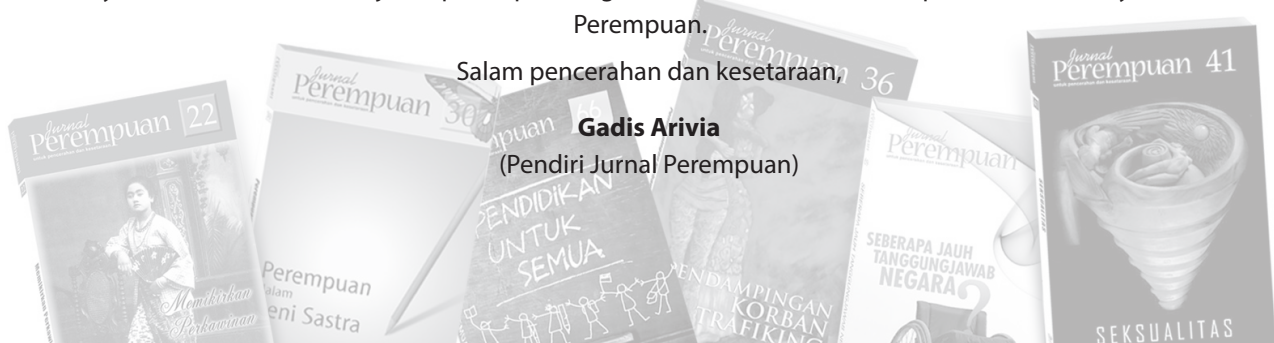
Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas
Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional
Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University
of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi
Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan
Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies,
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton
University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian
Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media,
Indonesian Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas
Indonesia)

Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)

Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme,
Universitas Indonesia)

Elisabet Kuswijayanti M.Si. (Ekologi dan Gender)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender &
Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat,
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme,
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe
University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender,
University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Februari 2020

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Lahan Gambut/ <i>Women and Peatlands</i>	iii
--	-----

Artikel

- Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan/ *Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges* 1-12
Myrna Asnawati Safitri
- Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau/ *Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces* 13-24
Catharina Indirastuti
- Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan/ *Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan* 25-35
Enik Maslahah
- Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut/ *Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland Areas* 37-45
Taqiyuddin Ibnu Syihab, Yustina Ambarini Murdiningrum, Lukas Rumboko Wibowo
- Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah/ *Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central Kalimantan* 47-61
Nur Iman Subono, Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Perempuan dan Lahan Gambut

Women and Peatlands

Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas mencapai 22,5 juta hektar. Ia menyumbang 47% luas lahan gambut di wilayah tropis dan merupakan negara dengan lahan gambut terluas di Asia Tenggara. Oleh sebab itu keberadaan lahan gambut di Indonesia memiliki arti penting bagi kelestarian lingkungan secara global. Sayangnya, wacana seputar lahan gambut masih muncul terbatas pada situasi tertentu seperti saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*). Wacana lahan gambut yang muncul pun umumnya berfokus pada persoalan ekologi dan ekonomi, padahal keberadaan lahan gambut memiliki dimensi luas, baik dari segi sosial, budaya, politik, bahkan dalam dimensi keadilan gender. Dengan luasnya kawasan lahan gambut di Indonesia, maka jelas bahwa lahan gambut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya penduduk yang hidup di sekitar kawasan lahan gambut, termasuk di dalamnya kaum perempuan.

Persoalan lahan gambut sebagai persoalan lingkungan secara global telah cukup lama dibahas, setidaknya sejak diadopsinya *the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat* (Konvensi Ramsar) di kota Ramsar, Iran, pada tahun 1971. Konvensi Ramsar telah menekankan pentingnya pencegahan kerusakan, pencegahan hilangnya lahan basah, serta pentingnya pelestarian lahan basah sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Ramsar pada tahun 1991. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyebutkan lahan gambut sebagai ekosistem bumi yang sangat berharga karena fungsinya dalam pelestarian keragaman hayati, sebagai sumber air, pencegahan banjir, dan untuk mengatasi perubahan iklim.

Ekofeminisme secara umum melihat akar dari kerusakan terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan sebagai akibat dari dominasi patriarki. Sebagaimana pandangan Karen J. Warren, cara pandang patriarki yang hierarkis dan opresif telah menindas alam dan perempuan. Kerusakan kawasan lahan gambut di Indonesia telah terjadi sejak zaman Orde Baru seperti salah satunya adalah *Rice Mega Project* yang mengubah lahan gambut di Kalimantan menjadi lahan persawahan. Pembangunan yang agresif dan juga bencana seperti kebakaran lahan dan hutan yang telah berjalan selama puluhan tahun tersebut telah berakumulasi dan menjadi warisan persoalan kawasan lahan gambut di Indonesia yang kita hadapi hingga hari ini.

Karhutla besar yang terjadi di Indonesia pada medio 2015 merupakan peringatan dan penanda penting atas ancaman terhadap kawasan lahan gambut di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. BRG merupakan sebuah lembaga non-struktural di bawah Presiden yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kawasan lahan gambut di tujuh provinsi, yaitu: Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua. Konsep restorasi lahan gambut yang dijalankan oleh BRG mengakui bahwa pemulihan tanah tidak dapat dilakukan hanya dalam dimensi ekologis-geologis, tetapi juga dalam dimensi pemulihan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem lahan gambut. Konsekuensinya maka kaum perempuan juga harus menjadi penerima manfaat dan sekaligus agen dalam proses restorasi tersebut.

Perempuan memiliki kepentingan yang besar akan kelestarian lingkungan. Maria Mies dan Vandana Shiva, pemikir dan aktivis ekofeminisme, berargumen bahwa perempuan memiliki kepentingan yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal

ini disebabkan oleh peran gender yang dibebankan kepada perempuan dalam pengasuhan dan pengelolaan kehidupan sehari-hari. Sehingga, agar dapat memberikan nutrisi yang cukup bagi anak dan/atau keluarga, memperoleh air yang bersih, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya, maka perempuan memiliki kepentingan akan ketersediaan dan kelestarian sumber daya alam seperti air, udara, lahan, serta flora dan fauna.

Kaum perempuan yang hidup di kawasan lahan gambut merupakan gambaran yang jernih tentang hubungan antara kerusakan lingkungan dan akibatnya terhadap perempuan. Salah satu budaya dan ekonomi lokal di kawasan lahan gambut di Kalimantan adalah anyaman purun (purun adalah sejenis rumput yang tumbuh di lahan gambut dan sering digunakan sebagai bahan anyaman). Keterampilan menganyam purun umumnya dilakukan oleh perempuan, dan dilakukan di sela-sela waktu peran pengasuhan di dalam rumah tangga atau keluarga. Rusaknya lahan gambut menyebabkan hilangnya purun yang tumbuh bebas di sekitar desa. Ketika purun tidak lagi tumbuh di sekitar desa, maka perempuan pengrajin purun harus mencari purun jauh keluar desa, atau harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli purun untuk bahan baku pembuatan anyaman.

Bencana karhutla di kawasan lahan gambut telah menyebabkan kerugian ekonomi dan trauma terhadap penduduk. Perempuan adalah kelompok yang merasakan dampak langsung karhutla dalam kehidupan sehari-hari, seperti keringnya sumber air, rusaknya kebun, dan hilangnya sumber daya hayati lokal seperti ikan. Namun demikian, program-program pencegahan karhutla masih cenderung mengabaikan perempuan. Padahal ketika kebakaran terjadi, perempuan juga turut memadamkan api baik di lahan perkebunan maupun di pemukiman. Perempuan juga harus memikirkan dampak lanjutan dari karhutla terhadap kehidupan keluarga. Misalnya, kaum perempuan harus mencari cara mencegah asap masuk ke dalam rumah, atau merawat anggota keluarga yang sakit akibat asap ketika terjadi karhutla.

Pengalaman kerusakan lahan gambut dan akibatnya terhadap masyarakat dan perempuan menguatkan argumen ekofeminis seperti Ynestra King. King berpandangan bahwa kerusakan dan/atau penindasan yang terjadi terhadap manusia berakar dari relasi yang hierarkis dan timpang. Sebagaimana relasi kuasa yang timpang antara laki-laki terhadap perempuan, akibat yang kita rasakan dari rusaknya kawasan lahan gambut, karhutla, bencana asap, dan lainnya, juga menggambarkan relasi kuasa dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut selama ini.

Namun, ekofeminisme tidak berhenti pada argumen akan keterkaitan antara eksploitasi terhadap alam dengan dominasi terhadap perempuan. Ekofeminisme juga melihat agensi perempuan dalam memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengalaman perempuan fasilitator desa di Desa Peduli Gambut memperlihatkan keberdayaan diri yang politis perempuan untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam proses restorasi gambut. Ekofeminisme menawarkan perubahan dalam cara pandang manusia yang superior terhadap alam melalui kacamata keadilan gender. Ajakan yang sama diajukan melalui pengetahuan yang dihadirkan dari pengalaman kaum perempuan, serta upaya mereka untuk memulihkan dan memelihara lahan gambut, di dalam edisi Jurnal Perempuan kali ini. Selamat membaca!

(Atnike Nova Sigiyo)

Myrna Asnawati Safitri (Badan Restorasi Gambut dan Universitas Pancasila, DKI Jakarta, Indonesia)

Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan

Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 1-12, 24 daftar pustaka

Degradation of peatland ecosystems occurs as a result of excessive exploitation leading to peat drainage and fires. This was influenced by a masculinity perspective in resource tenure and utilization. Ecofeminism presents a different perspective on narratives and inter-relationships of human with nature, including the place of women in them. Injustice that befalls women occur due to unequal power relations in the control and utilization of resources in the peatland ecosystem. This paper discusses the Government of Indonesia's efforts to reduce gender injustice through Peatland Restoration's policy. Two policies are discussed here, namely the Social Safety Safeguard and Peat Cares Village Program. It is concluded that women's participation must be able to resolve the imbalance of power relations among women as well as between gender. This requires sufficient time and everlasting education.

Keywords: ecofeminism, power relation, peatland, peatland restoration.

Kerusakan ekosistem gambut terjadi akibat eksploitasi berlebihan sehingga menyebabkan kekeringan dan kebakaran. Hal ini dipengaruhi pandangan maskulinitas pada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ekofeminisme hadir memberi cara pandang lain terhadap narasi dan relasi manusia dengan alam, termasuk tempat perempuan di dalamnya. Ketidakadilan yang menimpa perempuan terjadi karena relasi kuasa yang tidak berimbang dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di ekosistem gambut. Tulisan ini mendiskusikan upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketidakadilan gender melalui kebijakan Restorasi Gambut. Terdapat dua kebijakan yang dibahas yaitu Kerangka Pengaman Sosial dan Program Desa Peduli Gambut. Disimpulkan bahwa partisipasi perempuan sejatinya juga harus mampu menyelesaikan ketidakseimbangan relasi kuasa antar perempuan selain antar gender. Untuk ini diperlukan waktu yang cukup serta edukasi yang terus-menerus.

Kata kunci: ekofeminisme, relasi kuasa, gambut, restorasi gambut.

Catharina Indirastuti (Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan)

Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau

Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 13-24, 1 grafik, 9 daftar pustaka

Forest and land fire that repeatedly destroyed million hectares of peatland in Indonesia is a result of unsustainable peatland governance for many years. Rural women and men living in peatland have different experiences with forest and land fire. Intersectionality between gender

and class, geographical location, and ethnicity further add nuances to these different experiences. This article explores women experiences in fighting peat forest and land fire in 3 target villages of Peat Care Village Program led by Peat Restoration Agency in Central Kalimantan and Riau. Power network that women must endure and a priori on gendered roles and responsibilities weaken women's position in fighting peatland fire. Women do not have access to resources given to prevent and fight against forest and land fire, while in reality fire-fighting activities require women's involvement especially when it happened in their land or living space. Women experiences in facing peat forest and land fire is reflected using feminist political ecology approach to highlight the multiple impacts that women experience.

Keywords: forest and land fire, intersectionality, peatland villages, women's access.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang kali membakar jutaan hektar lahan gambut di Indonesia merupakan akibat dari tata kuasa dan tata kelola lahan gambut yang tidak berkelanjutan selama puluhan tahun. Perempuan dan laki-laki di wilayah gambut perdesaan memiliki penghayatan yang berbeda mengenai karhutla. Interseksionalitas antara gender dengan kelas, lokasi geografis, dan suku turut mewarnai perbedaan pengalaman yang dirasakan. Artikel ini menelusuri pengalaman perempuan dalam penanggulangan karhutla di 3 desa dampingan Badan Restorasi Gambut dalam Program Desa Peduli Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau. Jaringan relasi kuasa yang melingkupi kehidupan perempuan dan *a priori* atas peran dan tanggung jawab yang digenderkan melemahkan posisi perempuan menghadapi karhutla. Perempuan tidak memiliki akses atas sumber daya untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, sementara aktivitas penanggulangan karhutla menuntut keterlibatan perempuan karena terjadi di ruang hidup perempuan. Pengalaman perempuan menghadapi karhutla direfleksikan dengan pendekatan ekologi politik feminis untuk melihat dampak berlapis yang dialami perempuan.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, interseksionalitas, desa gambut, akses perempuan.

Enik Maslahah (Badan Restorasi Gambut (BRG), Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan)

Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 25-35, 4 tabel, 10 daftar pustaka

Purun is a typical plant that grow in peatland area that has important functions for people living in peatland area. The availability of purun is now decreasing due to changes in land management and environmental destruction. Almost all of the plantation commodities in the peatlands area, management of peatlands in the forestry, agriculture, plantation and fisheries sectors apply exploitative and pragmatic methods, while ignoring environmental sustainability. Furthermore, environmental damage also occurs due to disasters such as forest and land fires that often occur in peatland areas in Indonesia. One of the damages happen to peatland area is the damage and scarcity of purun. As users and beneficiaries of purun, women become the affected group that face the impact of peatland destruction. This paper describes the experiences and efforts of women in peatland areas to restore land and restore the existence of purun in their villages.

Keywords: women and peatland, purun, peatland restoration.

Purun adalah salah satu tanaman khas yang hidup di kawasan lahan gambut yang memiliki fungsi bagi masyarakat di kawasan lahan gambut. Keberadaan purun saat ini mulai berkurang akibat perubahan tata kelola lahan dan kerusakan lingkungan. Sebagian besar komoditas perkebunan di kawasan lahan gambut, pengelolaan lahan gambut di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan dikelola dengan cara eksploitatif dan pragmatis, sementara kurang menghiraukan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga terjadi akibat bencana seperti kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi di kawasan lahan gambut di Indonesia. Salah satu kerusakan yang terjadi terhadap kawasan lahan gambut adalah kerusakan dan kelangkaan tanaman purun. Sebagai pengelola dan pemanfaat purun, perempuan menjadi kelompok terdampak yang menghadapi dampak kerusakan lahan gambut. Tulisan ini memaparkan pengalaman dan upaya perempuan di kawasan lahan gambut untuk merestorasi lahan dan mengembalikan keberadaan purun di desa mereka.

Kata Kunci: perempuan dan lahan gambut, purun, restorasi gambut.

¹Taqiyuddin Ibnu Syihab, ²Yustina Ambarini Murdiningrum,
³Lukas Rumboko Wibowo (¹²Epistema Institute, ³P3SEKPI, DKI Jakarta, Indonesia)

Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut

Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland Areas

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 37-45, 2 gambar, 21 daftar pustaka

This paper aims to examine the elimination process of traditional conservation that has been built for many years by women on peatlands. This article reveals the struggle and multiple burdens of women in conservation, to do reproductive and productive work in the midst of clashing interests in peatland area. Research conducted shows that there is a shift in the mode of production from subsistence toward exploitative hegemony by capitalistic interests, as a product of modern scientific knowledge. Corporations compete for peatland areas to accumulate endless capital which then threatens the purun and the purun weaving community of women. This has not only led to degradation of the purun ecosystem but also the loss of source of life and cultural identity for the purun weaving community. From an ecofeminist perspective, investment policies and regimes with minimum controls have systematically destroyed peat ecosystems, resulting in economic powerlessness and impoverishment of women.

Keywords: purun, women and natural resources, women and peatlands

Tulisan ini mengkaji proses penyingkiran terhadap konservasi tradisional yang telah terbangun secara bertahun-tahun oleh kaum perempuan di lahan gambut. Artikel ini mengungkapkan pergulatan dan multi beban perempuan dalam konservasi, melakukan pekerjaan reproduktif dan produktif di tengah-tengah semakin derasnya perebutan dan klaim kepentingan atas lahan gambut. Penelitian yang dilakukan memperlihatkan adanya pergeseran mode produksi dari subsistensi menuju ke arah eksploitatif yang terhegemoni oleh kepentingan yang kapitalistik, sebagai produk dari ilmu pengetahuan modern. Korporasi memperebutkan lahan gambut untuk akumulasi kapital yang menjadi ancaman bagi purun dan komunitas perempuan penganyam purun. Akibatnya, komunitas penganyam purun tidak hanya kehilangan sumber kehidupan dan ekosistem purun tetapi juga identitas budaya mereka. Perspektif ekofeminis memandang bahwa

kebijakan dan rezim investasi dengan kontrol minimum secara sistematis telah menghancurkan ekosistem gambut, yang mengakibatkan ketidakberdayaan ekonomi dan pemiskinan perempuan.

Kata kunci: purun, perempuan dan sumberdaya alam, perempuan dan lahan gambut

¹Nur Iman Subono, ²Andi Misbahul Pratiwi, ²Abby Gina
(¹Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia & ²Jurnal Perempuan, DKI Jakarta)

Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah

Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central Kalimantan

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 47-61, 1 tabel, 2 grafik, 17 daftar pustaka

Peatlands play an important role in the ecological and economic aspects. Peatlands degradation in various regions in Indonesia brings economic issues, especially for women. The involvement of women in the peatland restoration program as a strategy needs to be reviewed. This research focuses on the involvement of women in the peatland restoration as a village facilitator, mainly on aspects of economic revitalization. This research focuses in 3 Villages in Central Kalimantan Province, Jabiren Village, Tumbang Nusa Village, and Gandang Barat Village. The main question of this research is how are the actions, challenges, and strategies experienced by women as village facilitators in the Desa Peduli Gambut program. Based on in-depth interviews with relevant actors and literature studies, this research finds, 1) the economic revitalization program conducted by women village facilitators build the economic resilience of rural women communities and changes the gender relations; 2) women village facilitators faced structural and cultural obstacles in their action; 3) the program is also the part of political actions for peatlands preservation.

Keyword: women village facilitator, peatlands restoration, economic revitalization, power

Lahan gambut memainkan peran penting dalam aspek ekologi dan ekonomi. Degradasi lahan gambut di berbagai daerah di Indonesia membawa masalah ekonomi masyarakat, terutama bagi perempuan. Pelibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut menjadi salah satu strategi yang patut ditinjau. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut sebagai fasilitator desa, terutama perannya pada revitalisasi ekonomi desa. Penelitian ini berfokus pada perempuan fasilitator desa di 3 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Desa Jabiren, Desa Tumbang Nusa, dan Desa Gandang Barat. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana tindakan, tantangan, dan strategi yang dialami oleh perempuan sebagai fasilitator desa dalam program Desa Peduli Gambut. Berdasarkan wawancara mendalam dengan aktor-aktor dan studi literatur yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa 1) program revitalisasi ekonomi yang dilakukan oleh perempuan fasdes membawa dampak terhadap ketahanan ekonomi perempuan pedesaan dan perubahan relasi gender di dalam keluarga; 2) perempuan fasilitator desa mengalami hambatan struktural dan kultural dalam aksinya; 3) program yang dikembangkan perempuan fasdes merupakan bagian dari aksi politik untuk pelestarian lahan gambut.

Kata kunci: perempuan fasilitator desa, restorasi lahan gambut, revitalisasi ekonomi, kekuasaan

Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau

Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces

Catharina Indirastuti

Kemitraan-Partnership for Governance Reform
Jl. Taman Margasatwa Raya No.26C, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12550

Indirastuti@gmail.com

Kronologi Naskah: Diterima 27 Maret 2020; direvisi 3 April 2020; diputuskan diterima 15 April 2020

Abstract

Forest and land fire that repeatedly destroyed million hectares of peatland in Indonesia is a result of unsustainable peatland governance for many years. Rural women and men living in peatland have different experiences with forest and land fire. Intersectionality between gender and class, geographical location, and ethnicity further add nuances to these different experiences. This article explores women experiences in fighting peat forest and land fire in 3 target villages of Peat Care Village Program led by Peat Restoration Agency in Central Kalimantan and Riau. Power network that women must endure and a priori on gendered roles and responsibilities weaken women's position in fighting peatland fire. Women do not have access to resources given to prevent and fight against forest and land fire, while in reality fire fighting activities require women's involvement especially when it happened in their land or living space. Women experiences in facing peat forest and land fire is reflected using feminist political ecology approach to highlight the multiple impacts that women experience.

Keywords: forest and land fire, intersectionality, peatland villages, women's access.

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang kali membakar jutaan hektar lahan gambut di Indonesia merupakan akibat dari tata kuasa dan tata kelola lahan gambut yang tidak berkelanjutan selama puluhan tahun. Perempuan dan laki-laki di wilayah gambut perdesaan memiliki penghayatan yang berbeda mengenai karhutla. Interseksionalitas antara gender dengan kelas, lokasi geografis, dan suku turut mewarnai perbedaan pengalaman yang dirasakan. Artikel ini menelusuri pengalaman perempuan dalam penanggulangan karhutla di 3 desa dampingan Badan Restorasi Gambut dalam Program Desa Peduli Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau. Jaringan relasi kuasa yang melingkupi kehidupan perempuan dan *a priori* atas peran dan tanggung jawab yang digenderkan melemahkan posisi perempuan menghadapi karhutla. Perempuan tidak memiliki akses atas sumber daya untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, sementara aktivitas penanggulangan karhutla menuntut keterlibatan perempuan karena terjadi di ruang hidup perempuan. Pengalaman perempuan menghadapi karhutla direfleksikan dengan pendekatan ekologi politik feminis untuk melihat dampak berlipis yang dialami perempuan.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, interseksionalitas, desa gambut, akses perempuan.

Pendahuluan

Lahan gambut tropis merupakan salah satu ekosistem yang memiliki peran besar dalam pengaturan iklim dunia. Gambut memiliki kemampuan untuk menyimpan karbon dalam jumlah besar, sekitar 20 kali lipat lebih besar daripada simpanan karbon dalam tanah mineral biasa. Namun sebaliknya, tanpa tata kelola gambut yang berkelanjutan, lahan gambut justru berkontribusi besar pada perubahan iklim. Pengeringan 1 hektar lahan gambut untuk alih fungsi lahan berpotensi melepaskan 55 metrik ton CO₂, atau setara dengan membakar 6.000 galon bensin (pantaugambut.id 2017).

Serat-serat gambut yang kering juga merupakan bahan yang mudah terbakar. Ketika kebakaran gambut yang kering terjadi, api mampu menyebar cepat. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut dapat berlangsung hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, karena tidak seperti kebakaran yang terjadi di atas tanah mineral, titik api di lahan gambut tidak selalu berada di permukaan lahan namun dapat berada jauh ke dalam lapisan gambut. Api membakar tidak hanya kawasan hutan, namun juga lahan-lahan garapan masyarakat desa di kawasan gambut dan menghanguskan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

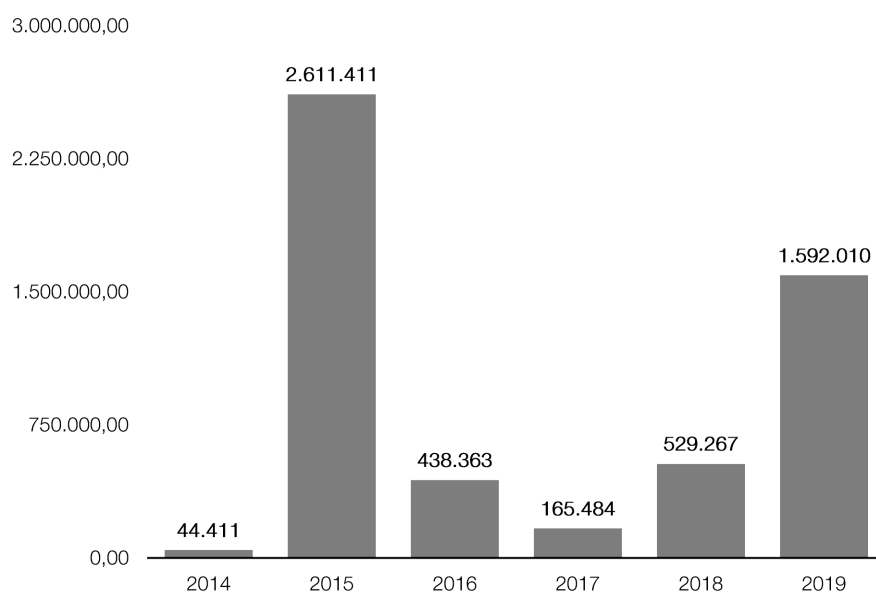
Penebangan kayu hutan dalam kawasan gambut dan pengeringan ribuan hektar lahan gambut dengan pembuatan kanal-kanal lebar agar lahan dapat dialihfungsikan terjadi secara masif sejak tahun 1980an—yang ketika dikombinasikan dengan pola pembukaan lahan dengan cara membakar—menjadi ancaman utama bagi kelestarian lahan gambut. Api pada lahan gambut yang kering tidak lagi terkendali dan karhutla yang melenyapkan ratusan ribu hingga jutaan hektar kawasan gambut pun terjadi.

Pengelolaan lahan dengan sistem membakar bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya karhutla. Ketidakhati-hatian manusia dengan sumber api lain, seperti puntung rokok atau penggunaan api untuk berburu atau memancing dapat menjadi penyebab lain karhutla. Selain juga percikan api yang terjadi secara alami pada musim kemarau. Mengeringnya gambut menjadi semakin parah karena perubahan iklim global

yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 pada grafik 1 menunjukkan kenaikan luasan hektar gambut yang terbakar dalam 3 tahun terakhir sejak 2017. Meskipun tidak seluas gambut yang terbakar pada tahun 2015, peningkatan luasan selama 3 tahun terakhir harus terus diwaspadai karena perubahan iklim turut berkontribusi pada bencana karhutla dengan semakin panjangnya musim kemarau.

Karhutla menjadi persoalan yang hampir selalu membayangi kawasan gambut. Setiap memasuki musim kemarau, masyarakat desa yang hidup di kawasan gambut sudah membayangkan tingginya risiko kebakaran yang dapat terjadi di lahan gambut, termasuk lahan garapan mereka. Jika pun lahan garapan ataupun kawasan desa tidak terbakar, musim kemarau tetap mendatangkan kesulitan karena asap akan memenuhi ruang udara desa, sehingga musim kemarau berubah menjadi ‘musim asap’.



Grafik 1. Tren Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia selama 2014-2019

Sumber: KLHK 2019 (Hardyanto 2020)

Sementara itu, pengeringan lahan gambut juga menyebabkan gambut kehilangan kemampuannya sebagai spons alami untuk menyerap air pada musim penghujan dan melepaskan air pada musim kemarau. Akibatnya musim bencana datang bergantian di desa-desa gambut yang memiliki degradasi kualitas gambut. Pada musim kemarau hutan, kebun, dan lahan gambut berisiko tinggi terbakar, sementara pada musim hujan desa-desa di sekitar lahan gambut mengalami banjir.

Karhutla gambut besar pertama kali terjadi pada tahun 1997. Sejak saat itu, hampir setiap tahun terjadi karhutla di beberapa wilayah Indonesia. “Musim asap” merupakan musim baru yang menandai cuaca di desa-desa di kawasan gambut. Namun kebakaran besar pada tahun 2015 adalah yang benar-benar menarik banyak perhatian dunia karena asap yang timbul dari api karhutla pekat dan menyebar hingga ke negara-negara tetangga. Protes dari negara-negara tetangga dan dunia

internasional memaksa pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih serius dalam mengatasi bencana asap.

Perempuan dan laki-laki dari kelompok sosial yang berbeda-beda, memiliki pengalaman berbeda dalam berinteraksi dengan alam, khususnya lahan gambut, dan juga dalam menghadapi karhutla. Robbins (2012) menuliskan bahwa proses-proses interaksi manusia-alam berbasis gender, artinya bahwa laki-laki dan perempuan mengalami lingkungan secara berbeda dan seringkali memiliki akses dan kontrol yang berbeda atas sistem-sistem ekologi, sebagai akibat dari peran-peran kultural dan sosial mereka yang cenderung mengarah pada hal-hal yang berbeda.

Perbedaan interaksi perempuan dan laki-laki dengan lahan gambut berkaitan dengan pembedaan peran, posisi, dan tanggung jawab yang dimiliki perempuan dan laki-laki, baik di ranah privat maupun publik. Akibatnya, kerentanan terhadap bencana yang terkait dengan lingkungan pun berbeda-beda, bias gender namun juga terkait dengan kelas, kelompok etnis, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Mia Siscawati bahwa perempuan bukan kelompok yang homogen, jadi tidak dapat dikatakan begitu saja bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan. Perempuan dari kelompok sosial tertentu bisa jadi adalah kelompok yang paling rentan (Gina 2019). Perbedaan posisi yang terjadi menyebabkan perempuan dan laki-laki, dari berbagai kelompok yang berbeda, memiliki akses dan kontrol yang berbeda atas berbagai sumber daya yang ada; baik sumber daya alam, pengetahuan dan informasi, finansial, peralatan dan teknologi, pendidikan untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan, dan berbagai sumber daya lainnya yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Pembedaan akses dan kontrol atas sumber daya yang ada ini membuat kerentanan terhadap risiko karhutla menjadi berbeda pula.

Berbagai perencanaan dan kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla di tingkat desa seringkali melupakan perempuan-perempuan desa yang juga memiliki ruang hidup di kawasan gambut. Sejatinya, perempuan desa selama ini telah turut terlibat dalam pengelolaan kawasan gambut dan penanggulangan karhutla, baik ketika api membakar lahan garapan maupun ketika api mendekati wilayah pemukiman. Pengalaman perempuan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan untuk pengelolaan kawasan gambut.

Artikel ini mengangkat pengalaman perempuan yang hidup di desa-desa kawasan gambut yang rentan

terbakar, yaitu 1) Desa Sungai Rukam, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau; 2) Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; dan 3) Desa Paduran Mulya, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kawasan gambut tropis terluas kedua di seluruh Indonesia setelah Papua dengan lahan gambut seluas 2,7 juta hektar dan merupakan provinsi dengan luas wilayah karhutla tertinggi di tahun 2019 dengan luas wilayah terbakar karhutla mencapai 134.227 hektar (Katadata 2019). Sementara Provinsi Riau termasuk wilayah dengan luas lahan gambut tertinggi ke-3 setelah Kalimantan Tengah dengan luas 2,2 juta hektar dengan sebagian besar lahan gambut telah dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Desa-desa yang menjadi fokus dalam artikel ini merupakan desa yang secara langsung mengalami karhutla gambut dan memiliki anggota masyarakat perempuan yang turun langsung ke lapangan untuk memadamkan api pada kebakaran di musim kemarau tahun 2019.

Data dalam artikel ini merupakan hasil wawancara mendalam dengan perempuan desa yang terlibat langsung dalam penanggulangan karhutla di lahan masing-masing dan diskusi kelompok terpusat bersama kelompok perempuan di setiap desa. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dalam rangkaian pendampingan desa yang menjadi target proyek Desa Peduli Gambut dari Badan Restorasi Gambut (BRG). Proyek ini diimplementasikan oleh Kemitraan-*Partnership for Governance Reform*. Wawancara juga dilakukan pada anggota kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) atau Masyarakat Sadar Api (MSA) yang dibentuk di tingkat desa, serta kepada aparat dan tokoh desa.

Meskipun tidak dilakukan murni untuk tujuan penelitian, diskusi dan wawancara mendalam bersama perempuan dan kelompok perempuan yang tinggal di desa rentan karhutla gambut selama pendampingan dapat menjadi jendela untuk mencari tahu seperti apa kisah para perempuan melawan api yang melahap kebun dan ladang mereka. Kisah mereka itulah yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap konteks alam dan sosial yang melingkupi kehidupan perempuan di desa gambut secara lebih mendalam, serta menawarkan gagasan untuk menjadikan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari pertimbangan dalam merancang berbagai program terkait pengelolaan gambut.

Status Lahan dan Kerentanan Karhutla: Lahan Siapa yang Terbakar?

Status lahan memengaruhi model pengelolaan lahan yang berada dalam kawasan gambut. Siapa yang memiliki lahan? siapa yang mengelola lahan? siapa yang memiliki akses untuk mendapatkan manfaat atas lahan tersebut? dan siapa yang dapat menentukan seperti apa model pengelolaan lahan yang akan diterapkan? Memetakan status lahan di kawasan gambut tidak selalu mudah karena satu lahan dapat dikelola oleh lebih dari satu orang dengan tingkat kendali yang berbeda-beda?

Tidak sedikit lahan di kawasan perdesaan gambut yang dimiliki oleh orang-orang dari luar desa. Lahan-lahan tersebut tidak selalu dikelola, sehingga rentan terbakar karena ditumbuhi semak belukar yang mudah terbakar. Sayangnya, ketika lahan-lahan yang tidak dikelola ini terbakar pemilik lahan cenderung membiarkan bahkan merasa beruntung karena lahan menjadi bersih sehingga dapat diolah dan ditanami.

Pembiaran kebakaran menjadi persoalan besar di desa-desa kawasan gambut karena bersebelahan dengan hutan atau lahan garapan masyarakat desa yang memiliki risiko ikut terbakar. Pemantauan yang harus dilakukan pengelola lahan tidak dapat dilakukan hanya di lahannya sendiri, namun juga di lahan atau kawasan di sekitar kebunnya.

Desa Sungai Rukam pada awalnya merupakan desa penghasil kelapa. Menurut salah satu tokoh di desa tersebut, pada masa jayanya, kelapa dari Sungai Rukam diekspor hingga ke Thailand dan Malaysia. Pelabuhan desa ramai mengangkut kelapa dan masyarakat desa hidup makmur. Selain kelapa bulat, kopra juga banyak dihasilkan di sana. Hingga pada satu saat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan melarang ekspor kelapa bulat karena berencana mengembangkan industri berbasis kelapa lokal—yang pada akhirnya gagal diwujudkan. Kebijakan ini mengakibatkan masyarakat desa kehilangan pasar mereka dan harga kelapa jatuh, sementara itu Thailand dan Malaysia mengembangkan kebun kelapa sendiri. Biaya pemeliharaan kebun dan pemanenan kelapa menjadi lebih tinggi daripada harga jual kelapa. Akibatnya banyak petani meninggalkan kebun-kebun kelapa mereka untuk mengupayakan sumber-sumber penghidupan lain. Lahan kebun kelapa seperti inilah yang banyak dibiarkan terlantar.

Lahan perkebunan kelapa yang terlantar dipenuhi semak belukar. Untuk membersihkan dan mengganti tanaman kelapa menjadi tanaman yang lebih menguntungkan dibutuhkan biaya besar. Oleh karena

itu, kebakaran seringkali tidak dipandang sebagai masalah karena ketika lahan yang dipenuhi semak belukar terbakar artinya lahan dapat dibersihkan tanpa mengeluarkan biaya dan pengerjaannya menjadi lebih cepat. Ketika api sudah padam, para pemilik lahan yang selama ini tidak mengelola dapat langsung menggarap lahan yang diyakini menjadi lebih subur setelah terbakar. Namun pembiaran karhutla menimbulkan persoalan serius, yakni api hampir selalu menyeberang ke lahan-lahan produktif yang digarap petani lain dan membakar tanaman.

Tidak semua lahan perkebunan yang tidak digarap dibiarkan terlantar. Seorang tuan tanah dari luar Desa Sungai Rukam yang memiliki lahan hingga belasan hektar di Sungai Rukam mengizinkan beberapa keluarga menggarap lahannya yang tidak dikelola. Umumnya, keluarga-keluarga penggarap lahan merupakan pendatang dari luar Sungai Rukam. Salah satunya adalah Ibu M, seorang perempuan berusia 30 tahun dengan dua anak balita yang *mengaron* (menggarap) lahan milik tuan tanah tersebut bersama suaminya. Lahan yang dikerjakan Ibu M bersama suaminya merupakan lahan yang jauh dari pemukiman. Karena jauh dari wilayah pemukiman, umumnya para pendatang yang bekerja sebagai penggarap tinggal di rumah semi-permanen yang mereka bangun di dalam kebun. Sebagian petani penggarap tidak memiliki lahan di desa mereka. Ibu M hanya memiliki warisan dari keluarganya 1 baris pohon kelapa yang telah dijualnya untuk membeli sebidang lahan di Sungai Rukam yang hingga saat ini belum dikelola.

Dalam sistem *mengaron*, petani penggarap seperti ibu M dan suaminya memiliki tanggung jawab untuk membersihkan lahan, menanam, dan memelihara tanaman keras pada lahan yang dipinjamnya hingga memberikan hasil. Jenis tanaman keras yang ditanam adalah sawit, kelapa, dan karet. Hingga 5 tahun pertama, seluruh hasil dari lahan yang digarap menjadi milik petani penggarap. Setelah itu, barulah petani penggarap harus membagi hasil lahan tersebut dengan pemilik lahan. Namun sesungguhnya dibutuhkan 5 hingga 8 tahun untuk mendapatkan hasil dari tanaman keras. Untuk dapat menunjang kehidupan mereka, para petani penggarap biasanya menanam sebagian lahan dengan sayur atau tanaman hortikultura lain yang dapat hidup di lahan gambut.

Menggarap lahan tidak membuat Ibu M aman dari risiko karhutla, sebab ia dan penggarap lain bekerja di hamparan lahan yang dikelilingi lahan terlantar—yang berisiko terbakar. Ibu M telah menggarap lahan tersebut

selama 2 tahun ketika kebakaran terjadi pada Agustus 2019.

Dapat dibayangkan rasa kehilangan Ibu M ketika tanaman keras yang ia tanam terbakar habis, sementara ia tidak memiliki alternatif penghidupan lain kecuali bekerja sebagai buruh harian atau mengolah lahan dari awal lagi. Bagi petani-petani penggarap seperti Ibu M, membiarkan lahan garapannya terbakar bukanlah pilihan. Saat terjadi kebakaran di lahan sayuran yang ditanamnya, Ibu M menolak meninggalkan rumah dan lahannya. Ia membawa masuk anak-anaknya yang masih balita ke dalam rumah ketika api mulai melahap kebunnya. Tetangga dan anggota MSA pun sulit meminta Ibu M mengungsi ke wilayah lain di desa. Menurut salah seorang tetangganya, Ibu M tidak akan mau datang jika tak dijemput karena ia merasa bukan bagian dari masyarakat desa.

Ibu M adalah seorang pendatang yang sehari-hari hidup jauh dari masyarakat desa lainnya dan pusat desa, mengelola lahan milik orang lain, dan tidak pernah terlibat dalam berbagai kegiatan di desa, termasuk kegiatan sosialisasi mengenai karhutla dan asap. Ia adalah representasi dari perempuan yang hidup di wilayah yang rentan karhutla, ia mengelola lahan tapi tidak memiliki akses atas berbagai sumber daya yang ada untuk mencegah dan menanggulangi karhutla. Ia pun datang dari kelompok yang terpinggirkan secara geografis dari desa, dan dari kelompok pendatang yang miskin.

Untuk mengurangi risiko karhutla pada lahan-lahan yang tidak digarap, saat ini Desa Sungai Rukam sedang mengupayakan disusunnya Peraturan Desa (Perdes) yang dapat mendorong pemilik lahan mengelola lahan yang terlantar agar tidak menjadi sumber karhutla. Perdes ini diharapkan dapat mengatur pemantauan dan pemeliharaan lahan oleh pemilik lahan untuk menurunkan risiko terbakar.

Di desa-desa lain, ditemui kisah mengenai status kepemilikan lahan yang berbeda. Desa Buntoi, merupakan desa dengan mayoritas penduduk asli dari suku Dayak. Lahan-lahan yang mereka miliki sebagian besar adalah lahan warisan keluarga atau *Petak Pelaku*. *Petak Pelaku* secara penuh dimiliki perempuan (termasuk legalitasnya), namun umumnya berada di wilayah desa suami sang perempuan. Masyarakat Dayak di Buntoi memiliki lebih dari satu kebun yang dapat dikelola sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi bencana karhutla.

Sementara itu, di Desa Paduran Mulya yang merupakan desa transmigran, hampir semua masyarakat

memiliki lahan sedikitnya 2 hektar per keluarga. Sedikit berbeda dari masyarakat Sungai Rukam dan Buntoi, karhutla yang terjadi di Paduran Mulya lebih dekat dengan wilayah pemukiman masyarakat karena kebun-kebun karet terletak tidak jauh dari pemukiman. Hal ini menyebabkan keterlibatan perempuan dalam penanggulangan karhutla menjadi lebih besar karena dalam beberapa insiden yang diceritakan oleh perempuan desa yang terlibat dalam penanggulangan api, ketika kebakaran sebagian laki-laki tidak berada di desa. Perempuan desa yang tidak memiliki akses untuk mengikuti pelatihan penanggulangan api harus turun langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya dan tanpa alat pelindung diri. Risiko kecelakaan dalam jangka pendek dan risiko kesehatan lain yang mungkin muncul dalam jangka panjang harus ditanggung perempuan yang mengatasi api tanpa perlindungan.

Perempuan Melawan Api: Tanpa Pengetahuan, Perlindungan, dan Peralatan Memadai

Desa Paduran Mulya

Desa Paduran Mulya, Kecamatan Sebangau Kuala, Kalimantan Tengah, kini adalah desa yang sepi. Sebagian penduduknya pergi karena tidak lagi mudah mendapatkan sumber penghidupan akibat karhutla gambut yang terjadi secara berkala sejak kebakaran besar pada tahun 2015. Desa yang awalnya subur dan memiliki banyak hasil bumi ini mengalami kerusakan alam yang cukup parah sejak hutan di sekitarnya dibabat. Ketika pembalakan kayu hutan sedang marak, Paduran Mulya berkembang makmur karena terdapat pusat pengolahan kayu besar yang membuka jalur transportasi tidak hanya untuk kayu hutan namun juga berbagai hasil pertanian. Ketika kayu habis dan alam rusak, pasar hasil pertanian masyarakat desa pun menghilang dan kebakaran mulai terjadi. Perlahan orang-orang muda mulai meninggalkan desa. Ketidakterbacaan orang-orang muda menimbulkan persoalan tersendiri ketika karhutla mencapai wilayah pemukiman karena banyak keluarga yang terdiri dari orang lanjut usia membutuhkan bantuan.

Karhutla yang terjadi hampir setiap tahun sejak tahun 2015 menyisakan trauma bagi masyarakat Paduran Mulya. Banyak yang merasa putus asa menanam tanaman jangka panjang—seperti sawit, kopi atau karet—karena berulang kali habis terbakar. Selain itu, penyebaran api hingga ke wilayah pemukiman menimbulkan trauma yang lain terutama bagi perempuan dan anak-anak yang secara langsung mengalami kebakaran. Ibu Y yang kini tinggal berdua saja dengan suaminya menceritakan pengalaman mereka.

Kebakaran yang besar terjadi setiap tahun. Jika ada kemarau pasti ada kebakaran, dimana-mana api. Yang masuk lokasi [pemukiman] dulu tahun 2015, di sini pas terbakar semua, tidak ada yang menolong rumah kami. Angin yang datang adalah angin yang memutar [puting beliung] yang membuat api sulit dipadamkan. Saya memompa air sambil menangis, karena semua orang sibuk menyelamatkan kebun dan rumahnya masing-masing. Suami saya sibuk memadamkan api sampai tidak makan seharian. Seluruh rumah kami siram agar tidak terbakar, tapi api sudah ada di atas atap rumah saya ... Api seperti memayungi. Saya menyirami rumah, di atas saya ada api. Waktu itu masih ada satu orang anak yang masih tinggal bersama kami, pulang sekolah langsung ikut memadamkan api, sampai hampir pingsan karena tidak makan. Hanya dalam waktu 1 jam, api sudah menyebar. Karet hasil satu minggu tidak sempat saya ambil. Pohonnya terbakar, banyak yang roboh dan mati. Saya ketakutan hingga menggigil, akhirnya saya diungsikan. (Ibu Y 2019, Wawancara 25 Agustus)

Ada cukup banyak anggota masyarakat desa yang berusia lanjut di Paduran Mulya. Tidak jarang mereka hidup sendiri di pinggir kebun karet yang menyebabkan risiko api menyebar hingga rumah mereka menjadi lebih besar. Ibu W, seorang janda berusia 60 tahun, memiliki trauma karena terjebak di dalam rumah yang dikepung api. Karhutla menghabiskan 2 hektar kebun karet yang ia miliki, tidak ada satu pun pohon yang bisa diselamatkan.

Mempersiapkan rumah singgah di wilayah dusun rentan karhutla menjadi penting, terutama di desa-desa yang memiliki banyak anggota masyarakat lanjut usia. Lokasi rumah singgah sebaiknya berada di wilayah yang bersih dari semak belukar sehingga tidak berpotensi terbakar dan memiliki sumber air cukup.

Selain melakukan pemetaan kawasan gambut yang rawan terbakar, perlu dilakukan pemetaan tempat tinggal masyarakat desa, terutama memetakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus jika terjadi kebakaran, seperti kelompok lansia, ibu hamil, atau perempuan kepala keluarga. Pemetaan untuk menentukan prioritas penting dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya yang ada.

Karhutla yang menyebar hingga wilayah pemukiman masyarakat Paduran Mulya membuat perempuan desa harus turun menanggulangi api. Kebakaran kebun yang terakhir terjadi pada Agustus 2019 terjadi pada Jum'at siang ketika sebagian besar laki-laki mengikuti Shalat Jum'at. Sebagian besar perempuan desa ikut memadamkan api, karena mereka tidak dapat menunggu lagi. Anggota MPA pun turut memadamkan api, namun jumlah anggota MPA di desa ini tidak banyak.

Melihat asap dari jalan kan, kok asap sudah tebal, saya lihat bapaknya [suaminya, anggota MPA] sudah berlari-

lari membawa peralatan menuju ke tempat yang terbakar untuk bisa menjaga supaya api tidak menyebar ke pemukiman maupun ke hutan...Pas balik lagi, ibu lihat, asapnya kok semakin tebal. Saya pesan ke anak saya: nak, selang kompor dilepasin, ibu mau ke seberang sebentar siapa tahu gak ada orang di sana...Ibu ke seberang lihat anak-anak pada takut, nangis. Yang perempuan yang gak biasa mungkin gak kuat kan, pada nangis teriak-teriak... Kita, ibu-ibunya, terpaksa membantu bapak-bapaknya. Karena apinya besar. Mengangkat air, bantu orang yang mukulin api, dan menyiram api. Saat menyiram, angin berbalik bertiup kencang. Kena api, rasanya panas sekali. Kita coba cepat-cepat bikin sekat supaya apinya tidak nyambung. Tapi namanya anginnya besar, apinya Kembali datang lagi. (Ibu D 2019, Wawancara 25 Agustus)

Menurut ibu D, seharusnya perempuan dibekali pengetahuan tentang penanggulangan api dan sigap bertindak jika api mulai mendekati wilayah pemukiman. Seorang perempuan harus memastikan keluarganya aman di rumah, sebelum ia dapat pergi dan membantu menangani kebakaran di lingkungannya atau di rumah tetangganya.

Ibu D berkata, meskipun ia istri anggota MPA ia tidak pernah diikutsertakan dalam proses sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanggulangan karhutla. Ia juga tidak pernah memperoleh pelatihan tentang cara memadamkan api yang aman dengan peralatan pemadaman api yang ada di desa. Penanggulangan api dipandang sebagai kegiatan yang maskulin dan bukan bagian dari tugas perempuan, sementara pada kenyataannya perempuan seringkali harus terjun langsung untuk memadamkan api.

Desa Sungai Rukam

Karhutla gambut yang terjadi pada tahun 2019 di Desa Sungai Rukam berlangsung selama 3 bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2019. Selain api, Desa Sungai Rukam juga diselimuti asap hingga berbulan-bulan sampai hujan akhirnya turun. Kebakaran yang berlangsung lama ini menghabiskan lahan produktif, terutama kebun sawit dan pinang. Lahan-lahan habis terbakar karena tidak ada sumber air yang cukup dekat untuk memadamkan api, sementara selang pemadam kebakaran terlalu pendek untuk mencapai sumber air.

Pemilik lahan yang mengalami karhutla berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya seperti ember dan tangki-tangki kecil yang dapat digendong. Selain anggota MSA, pemilik lahan yang lahannya belum terbakar ikut memadamkan api untuk mencegah karhutla mencapai lahan mereka. Para perempuan pun ikut turun tangan.

Kami kesal dan kecewa pada waktu memadamkannya. Airnya kering, sungainya sebenarnya sudah memiliki sekat kanal, tapi (sungainya) kering. Jadi meskipun sudah disekat tetap tidak ada air. Kami hanya bisa menyaksikan kebun kami terbakar. Habis semua kebun saya. Tidak ada lagi harapan. Biasanya dari situ kan sedikit-sedikit bisa saya harapkan hasilnya. Sekarang tak ada lagi. Kelapa, pinang, sawit. Kebun kami 1 hektar habis, itu tanah warisan kami yang paling banyak menghasilkan. Saat ini, 1 pokok kelapa pun tak ada lagi. (Ibu Y 2019, FGD 27 November)

Pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah yang cukup luas di Sungai Rukam tidak dapat dilakukan dengan mudah karena terbatasnya sumber air pada musim kemarau. Sungai dan parit mengering, sekat kanal yang sudah dibangun pun seperti sia-sia saja. Antara satu hamparan dan hamparan lainnya biasanya dipisahkan oleh parit-parit kecil yang digunakan untuk mengangkut hasil kebun. Parit-parit ini yang menjadi sumber air untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Menurut para pekebun, parit-parit hanya menyisakan sedikit air jika kemarau berlangsung lebih dari 6 bulan. Pada musim itu, tiupan angin membawa percikan api yang lekas menyebar dari satu hamparan ke hamparan lainnya, melompati parit-parit kecil tanpa dapat dikendalikan lagi.

Ada yang mencari air dengan menggali kolam. Ketika kami bersama-sama membuat kolam-kolam itu, apinya lewat mendekati kami ... jadi terpaksa kami tinggalkan saja kebun kami itu, daripada kami kehilangan nyawa, daripada kita mati, kebun kan bisa dicari lagi. Saya menggali berdua saja dengan suami. Tetangga tidak membantu, masing-masing menyelamatkan lahannya sendiri. Kebun saya langsung habis, terus terbakar. Jika ada ember kami bawa ember. Kami gali dengan alat seadanya saja. (Ibu J 2019, FGD 27 November)

Para perempuan yang ikut turun untuk memadamkan api seringkali bekerja tanpa peralatan pelindung yang layak. Masker yang dibagikan melalui Kantor Desa atau Puskesmas jumlahnya terbatas, dan diprioritaskan untuk anak-anak, orang tua, dan laki-laki yang turun langsung ke lapangan. Kelompok perempuan, meskipun turut memadamkan api, biasanya tidak memperoleh masker dan hanya menggunakan kerudung sebagai pengganti masker untuk menutup mulut dan hidung. Perempuan mengorbankan diri menjadi orang terakhir yang menggunakan masker di dalam keluarga.

Desa Buntoi

Di Desa Buntoi, masyarakatnya selain takut kehilangan tanaman produktif, juga takut pada aturan sanksi ganti rugi yang diterapkan pemerintah desa jika api yang membakar kebun mereka menyeberang ke kebun orang

lain. Kebun-kebun di Desa Buntoi rata-rata merupakan kebun tanaman keras seperti karet yang tidak perlu dibersihkan menggunakan api. Dengan alasan itu para perempuan tidak setuju sanksi ganti rugi karena mereka tidak pernah dengan sengaja membakar lahan mereka.

Kami tidak tahu dari mana asalnya api. Bapaknya sedang di rumah. Tiba-tiba kami melihat asap dari arah kebun. Langsung bapaknya pergi ke kebun, ternyata betul terbakar. Bapaknya balik lagi pulang untuk mengambil peralatan. Aku nyusul dia, bawa berbagai kebutuhan itu. Bapak dibantu MPA itu sigap mematikan api, namun sudah terbakar 100 pohon. Karena kebun saya juga jauh dari air ... harus ambil air dari pipa-pipa dan selang yang panjang sampai 200 meter. Saya ikut nyiram juga. Saya pakai botol ikut nyiram-nyiram. Apapun yang bisa dipakai, ya dipakai untuk menyiram. Kagetnya luar biasa. Kita gemetaran, sambil merasa was-was kalau sampai kena kebun orang. Bersebelahan kebun kami memang kebun sawit, sengon yang sudah mulai dipanen. Orang yang punya kebun sudah bilang: kalau sampai kena kebun saya nanti saya penjarakan. Sama, kalau kebun dia yang terbakar kena kebun kami juga kami bisa lakukan yang sama. Makanya paling takut kalau sampai kita dengar ladang kita terbakar. (Mama A 2019, FGD 14 Desember)

Selain anggota MPA, sebagian besar masyarakat desa yang turut memadamkan api, termasuk para perempuan, tidak menggunakan alat pelindung maupun peralatan untuk memadamkan api. Mereka bekerja dengan peralatan seadanya. Perempuan yang turut memadamkan api biasanya harus pulang pergi ke lokasi kebakaran sambil tetap mengerjakan tugas-tugas domestik termasuk menyediakan makanan dan minuman untuk suami dan orang-orang yang membantu memadamkan kebakaran di lahan mereka. Perempuan harus mengupayakan bahan bakar yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin dan upah untuk orang-orang yang diminta membantu. Ketika karhutla terjadi dan menghabiskan kebun mereka, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat Buntoi berlipat ganda: kehilangan tanaman sumber penghidupan, terancam sanksi dan penjara, serta harus membayar biaya-biaya ekstra untuk memadamkan api.

Seperti perempuan dari desa lain, perempuan Buntoi yang hadir dalam diskusi juga menyatakan bahwa sejauh ini perempuan belum pernah diikutsertakan dalam berbagai sosialisasi yang dilakukan terkait kebakaran hutan dan lahan. Padahal selama ini mereka telah terlibat dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Berbekal pengalaman tersebut, perempuan Buntoi merasa perlu terlibat dalam berbagai kegiatan pencegahan maupun mitigasi bencana agar mereka juga memiliki pengetahuan dan dapat berkontribusi dalam

kegiatan penanganan karhutla. Selain itu, tidak semua perempuan di desa memiliki anggota keluarga laki-laki. Ada yang menjadi kepala keluarga karena telah bercerai, ataupun ketika suami mereka harus bekerja di luar desa. Tidak adanya kegiatan yang melibatkan perempuan untuk turut mempersiapkan desa dalam menangani karhutla dan mitigasi risikonya, membuat perempuan tidak benar-benar siap.

Pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan untuk mempersiapkan desa dalam menangani karhutla merupakan bagian dari pengakuan akan peran aktif perempuan dalam berbagai upaya pencegahan maupun mitigasi bencana karhutla dan asap. Pengakuan ini memungkinkan perempuan untuk memperoleh akses atas berbagai sumber daya yang ada, termasuk akses atas informasi, bantuan, juga berbagai kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, pelibatan perempuan perlu dilakukan untuk menyusun strategi pencegahan dan mitigasi bencana yang mempertimbangkan pengalaman perempuan dalam menghadapi bencana karhutla dan asap.

Dampak Karhutla dan Alternatif Sumber-sumber Penghidupan Pasca Karhutla

Karhutla membawa banyak dampak bagi kehidupan masyarakat desa. Dampak ekonomi merupakan yang paling utama mereka rasakan. Terbakarnya lahan garapan dan tanaman produktif yang hampir atau sudah memberi hasil secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketika pemilik lahan yang terbakar masih memiliki lahan lain sebagai sumber penghidupannya, maka ia masih dapat bertahan. Namun jika tidak, migrasi sementara dari desa menjadi pilihan.

Migrasi umumnya dilakukan oleh laki-laki dewasa terutama untuk keluarga yang masih memiliki anak kecil. Anak laki-laki dan perempuan yang belum menikah tetapi sudah siap bekerja (seringkali sejak masih usia remaja) juga lebih memiliki kemungkinan meninggalkan desa untuk mencari kerja atau bekerja sebagai buruh harian. Ketika ini terjadi maka perempuan bertanggung jawab atas berbagai hal yang harus dilakukan di dalam rumah tangga.

Banyaknya laki-laki yang meninggalkan desa untuk mencari nafkah memberi dampak besar seperti yang terjadi di Desa Paduran Mulya karena terjadi pergeseran peran. Perempuan dewasa yang tinggal di desa untuk mengurus rumah, ternak, juga untuk menjaga lahan yang masih ada menjalankan hampir seluruh peran yang pada

awalnya dipegang laki-laki. Cairnya peran perempuan dan laki-laki dibutuhkan agar keluarga dapat bertahan.

Sama seperti di Desa Paduran Mulya, di Desa Sungai Rukam, ketika kebun terbakar, tanaman produktif habis, dan keluarga tidak lagi memiliki kebun atau sumber penghasilan lainnya. Laki-laki atau anak yang sudah cukup dewasa akan mencari pekerjaan upahan untuk menghasilkan uang hingga ke luar dari desa. Sebagian bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar desa, sebagian lagi merantau hingga Batam atau Malaysia dan menjadi buruh di sana.

Ketika laki-laki dan perempuan dewasa merantau, yang tertinggal di desa adalah perempuan dan laki-laki yang terlalu muda atau tua untuk merantau, juga perempuan hamil dan/atau dengan anak-anak kecil. Untuk kelompok ini, tidak banyak alternatif sumber penghidupan yang dapat diraih kecuali pekerjaan musiman yang kadang kala diberikan oleh tetangga mereka di desa.

Hilangnya kebun akibat karhutla tidak hanya berdampak pada sumber penghidupan masyarakat pemilik lahan. Kebun-kebun pinang yang ada di wilayah Sungai Rukam selama ini juga menjadi sumber penghidupan bagi perempuan dan laki-laki miskin yang bekerja upahan sebagai pengupas pinang. Dengan habisnya kebun-kebun pinang, hilang pula sumber penghidupan mereka.

Rata-rata para perempuan yang kebunnya terbakar habis mengatakan ingin menanam kembali namun modal dan bibit sering menjadi kendala. Mereka berharap pemerintah mau turun tangan membantu menyediakan bibit baru. Jika tidak ada bantuan bibit, mereka terpaksa mencari bibit yang tidak sengaja tumbuh di lahan orang lain. Namun menanam kembali bibit tanaman keras seperti pinang membutuhkan waktu panjang—dari menanam hingga mendapatkan hasil. Sehingga banyak perempuan juga bekerja mengerjakan kebun orang lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Di Desa Buntoi, kebakaran lahan menimbulkan kerugian besar. Mama A bercerita ia kehilangan 100 batang pohon karet akibat kebakaran. Hasil dari menyadap satu pohon Karet berukuran besar sekitar 1-2,5 ons getah per hari sehingga dalam sehari dengan 100 pohon ia memperoleh total sadapan sekitar 15-25 kg. Dengan frekuensi menyadap sekitar 3 kali seminggu, dalam sebulan Mama A menghasilkan uang sedikitnya 1 juta rupiah. Kebakaran menyebabkan ia kehilangan penghasilan. Ketika kebun terbakar, sebagian pekebun

mengganti jenis tanaman keras yang ditanam dengan pohon Sengon karena harga Karet saat ini semakin rendah. Namun Sengon tidak dapat digunakan untuk menunjang hidup sehari-hari seperti Karet karena hanya dapat dipanen satu kali setelah beberapa tahun.

Karhutla tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber penghidupan pekebun. Penduduk desa yang lain juga harus dapat bertahan dengan asap yang menyelimuti desa. Pada musim asap, masyarakat umumnya masih tetap menyadap Karet setiap hari, namun tidak melakukan penyadapan pada pagi hari karena kabut asap karhutla membuat jarak pandang menjadi terbatas. Para penyadap Karet, perempuan dan laki-laki, harus menunggu hingga matahari cukup tinggi agar dapat mencapai kebun mereka dengan aman. Hal ini berpengaruh pada pendapatan mereka dari menyadap Karet, karena biasanya dilakukan sejak dini hari untuk memperoleh hasil yang lebih banyak.

Perempuan Buntoi memiliki andalan lain yang dapat menjadi pegangan ketika Karet tidak memberikan hasil, yaitu dari anyaman rotan yang menjadi sumber penghasilan utama di musim kemarau. Kebun-kebun rotan yang dibudidayakan di sekitar wilayah pemukiman umumnya lebih aman dari karhutla karena terus dipantau. Namun jika pemilik tanaman rotan membudidayakan di wilayah hutan yang jauh dari pemukiman, maka risiko terbakar lebih besar. Jika ini terjadi, sumber penghidupan perempuan penganyam juga terancam.

Keragaman sumber penghidupan, baik untuk memperoleh penghasilan maupun untuk mendapatkan sumber-sumber pangan, memungkinkan masyarakat desa beradaptasi dalam konteks lingkungan yang berubah-ubah setiap musimnya. Dalam hal ini perempuan desa memiliki peran besar untuk memastikan sumber-sumber penghidupan yang lebih beragam.

Kehilangan sumber-sumber penghidupan utama, memang tidak selalu menyebabkan masyarakat desa tidak dapat menghidupi diri mereka karena selalu ada kerja upahan yang dapat mereka lakukan untuk menopang hidup sehari-hari. Namun hilangnya sumber penghidupan utama akan menghilangkan kemampuan masyarakat di desa yang rentan karhutla dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain, seperti pendidikan anak-anak dan kesehatan keluarga.

Selain dampak ekonomi, dampak asap pada kesehatan masyarakat desa juga menjadi salah satu persoalan yang ada—namun tidak selalu muncul ke permukaan. Hampir di semua desa yang mengalami kebakaran, masyarakat desa mengaku “sudah kebal” dengan asap karhutla.

Kebakaran yang telah berulang terjadi di desa menjadi alasan mengapa masyarakat beranggapan bahwa mereka sudah biasa dengan asap, terutama jika dikaitkan dengan masalah pernapasan. Hanya sedikit yang datang untuk berobat ke Puskesmas atau bidan desa. Banyak yang mengalami batuk, tenggorokan kering, atau mata perih, namun tidak sampai berobat ke Puskesmas.

Hampir semua orang mengalami masalah ini. Batuk kering dan mata pun terasa perih akibat asap. Ini tidak hanya terjadi ketika kami berada di luar rumah, namun juga ketika kami ada di rumah karena rumah kami tidak tertutup rapat, melainkan ada lubang-lubang di sela-sela pintu atau jendela, juga lubang yang dibuat supaya udara dapat masuk. Kami tetap berusaha untuk mengurangi asap masuk dengan selalu menutup pintu dan jendela sepanjang hari. (Ibu P 2019, FGD 13 Desember)

Pemeriksaan kesehatan masyarakat secara aktif tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan di desa, hanya menunggu ada laporan. Pos-pos kesehatan dibangun di beberapa desa, namun menurut pengakuan bidan desa, tidak banyak orang yang datang dan secara sukarela memeriksakan diri. Setidaknya di tiga desa yang menjadi fokus artikel ini, di tempat praktek bidan desa maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di desa tidak tampak poster atau alat edukasi lain mengenai bahaya asap untuk kesehatan. Tidak seperti karhutla 2015, pada 2019 hanya sedikit bantuan yang diperoleh sehingga masker diutamakan diberikan pada kelompok prioritas.

Tahun 2015 kami mendapat banyak bantuan masker. Pada kebakaran tahun 2019 ini, pada awalnya kami hanya mendapat pembagian 20 buah masker, yang diutamakan untuk para anggota MPA yang turun ke lapangan. Kemudian pada tahap kedua, masker dibagikan lewat Pustu. Namun jumlah yang diperoleh tidak cukup banyak. Jadi yang diprioritaskan untuk mendapatkan masker adalah anak-anak, ibu hamil dan mereka yang datang ke Puskesmas karena memang telah menderita ISPA atau penyakit saluran pernapasan sebelumnya. Untuk masyarakat desa yang tidak memiliki kondisi ini, harus membeli masker sendiri. (Ibu A 2019, FGD 13 Desember)

Dimensi Gender dalam Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Gambut

Program-program reformasi ekonomi yang hanya mengedepankan ekspansi pasar domestik dan global—yang bukan merupakan agenda untuk kesejahteraan sosial, kebijakan-kebijakan yang mencoba merespons perubahan iklim, tekanan lingkungan yang muncul karena pertumbuhan populasi dan semakin kuatnya mobilitas geografis, urbanisasi dan komoditisasi, telah

mengatur ulang pola-pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik di tingkat nasional maupun lokal yang memiliki dampak kompleks bagi kehidupan masyarakat (Elmhirst & Resurreccion 2008).

Pada persoalan degradasi ekosistem gambut yang pada akhirnya menimbulkan bencana karhutla berulang, terdapat sejarah panjang yang datang dari berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia sejak masa Orde Baru. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi untuk memastikan terwujudnya swasembada pangan. Langkah-langkah ekstrim yang diambil agar dapat mengeksploitasi alam untuk tujuan ini salah satunya adalah dengan mengalihfungsikan lahan gambut

menjadi lahan pertanian. Program pembangunan yang diawali dengan pembalakan kayu hutan secara besar-besaran dan berlanjut dengan pengeringan lahan gambut membawa dampak negatif dalam jangka panjang. Kebijakan Pemerintah Pusat yang pada saat itu belum mengenal fungsi dan karakteristik lahan gambut telah mengubah pola pengelolaan gambut dan mengancam kelestarian ekosistem gambut. Program-program yang dicanangkan untuk mendorong perekonomian di tingkat global dan nasional, pada akhirnya berdampak besar terhadap pengelolaan alam di tingkat lokal dan membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat lokal sehari-hari.



Gambar 1. Kelompok Perempuan di Pulang Pisau Berusaha Memadamkan Api Karhutla Tahun 2019

Sumber: Dokumentasi Sephiani

Proses perubahan ekologis yang terjadi karena perubahan pola pengelolaan sumber daya alam tidak memberikan dampak yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Rocheleau et al. (1996) menawarkan kerangka kerja terbuka yang menempatkan gender sebagai variabel kritis untuk mempertajam akses dan kontrol, yang dalam interaksinya dengan kelas, kasta, ras, budaya, dan suku. Variabel ini mempertajam proses perubahan ekologis yang seharusnya merupakan hasil perjuangan laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan kehidupan yang ekologis, dan menjadi masa depan bagi setiap masyarakat untuk mewujudkan “pembangunan

berkelanjutan” (Rocheleau et al. 1996, p.4) yang memusatkan perhatian pada tiga tema kunci yakni: pengetahuan lingkungan (berbasis) gender, hak dan tanggung jawab lingkungan berbasis gender, dan kegiatan akar rumput dan politik lingkungan berbasis gender.

Gender merupakan bagian dari subjektivitas yang bersifat multidimensi, tidak hanya terdiri atas kelas, kasta, ras, budaya, dan suku, namun juga tempat/*place*, dan praktik-praktik pembangunan itu sendiri. Secara khusus dalam pembahasan mengenai perempuan dan karhutla gambut ini, saya ingin menggaris-bawahi mengenai

dua topik yang menjadi fokus ekologi politik feminis: pengetahuan lingkungan yang berbasis gender dan hak-hak dan kewajiban lingkungan yang berbasis gender.

Pengetahuan perempuan dalam mengelola sumber daya alam di dalam kawasan gambut belum diperhitungkan dalam kegiatan pencegahan karhutla, terutama perempuan dari kelas ekonomi bawah yang datang untuk bekerja pada lahan-lahan garapan yang bukan milik mereka.

Kedekatan perempuan dengan alam membuat perempuan memperhitungkan berbagai unsur alam. Pengamatan perempuan akan apa yang terjadi pada ekosistem gambut menunjukkan ketajaman karena perempuan sehari-hari mengikuti perubahan alam (Indirastuti & Pratiwi 2020). Dengan demikian, dalam mengamati perubahan alam, khususnya di lahan gambut, perempuan juga dapat memiliki ketajaman untuk melihat perubahan ekosistem gambut yang menandai meningkatnya risiko terjadinya bencana kebakaran maupun banjir. Pelibatan perempuan dalam melakukan pemantauan atas lahan gambut, terutama pada wilayah-wilayah di mana perempuan banyak berinteraksi dengan lahan gambut, akan memperkuat ketahanan desa dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut.

Jaringan kuasa yang melingkupi kehidupan perempuan petani penggarap lahan, yang diawali dari relasi kuasa yang ada antara perempuan dan laki-laki dalam lingkup terkecil, keluarga, menandai posisi perempuan yang, dalam ancaman bencana, masih mengutamakan orang-orang lain selain dirinya dalam pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan karhutla. Relasi kuasa yang tidakimbang antara perempuan dari kelompok penggarap lahan dan kelompok pemilik lahan tergambar jelas. Pengelolaan lahan yang diterapkan pemilik lahan, melakukan pembakaran ketika lahan ditumbuhi semak dan terbakar karena ini akan menguntungkan dirinya. Sedangkan hal itu justru membuat perempuan dari kelompok penggarap lahan menjadi lebih rentan dalam bencana karhutla karena mereka hidup di tengah-tengah hamparan lahan yang berisiko terbakar.

Di tingkat desa, pemetaan lahan-lahan berdasarkan risiko kebakaran belum sepenuhnya mempertimbangkan suara petani penggarap lahan. Padahal mereka adalah kelompok dengan modal berkebun yang sedikit, maka akan sulit untuk bertahan pasca karhutla. Perempuan dari keluarga penggarap lahan harus menanggung beban lebih berat karena tetap harus memenuhi kebutuhan keluarga.

Lebih lanjut, Rao (1991) seperti dikutip oleh Elmhirst (2008) menyatakan bahwa untuk memahami kaitan antara gender, lingkungan, dan pembangunan maka kontekstualisasi kehidupan perempuan harus dilakukan—karena perempuan merespons realitas-realitas lingkungan yang kompleks secara dinamis. Menurut Rao, perlu juga mempertimbangkan bagaimana perempuan masuk ke dalam dan terlibat dalam relasi sosial dengan laki-laki di dalam institusi-institusi sosial yang bergantung pada alam, dan tidak menggunakan persepsi *a priori* tentang peran-peran perempuan.

Penelusuran terhadap pengalaman perempuan dalam penanggulangan karhutla memperlihatkan bahwa perempuan telah kehilangan hak-hak mereka untuk mempertahankan diri dari dampak karhutla. Skema kebijakan dan perlindungan yang ada belum dirasakan manfaatnya oleh kelompok perempuan, terutama perempuan penggarap lahan. Hak atas pengetahuan, keterampilan, dan peralatan yang memadai untuk mencegah dan memadamkan api masih dianggap sebagai hak laki-laki. Hal ini membuat kelompok perempuan penggarap di desa gambut mengalami kerentanan berlapis di tengah situasi Karhutla dan bencana asap.

Penutup

Tata kuasa dan tata kelola sumber daya alam di dalam kawasan gambut berpengaruh besar pada risiko terjadinya bencana karhutla dan kerentanan masyarakat yang hidup di dalamnya. Kerusakan ekologis yang menyebabkan bencana karhutla dampak dari tata kelola lahan gambut yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian gambut yang terjadi selama puluhan tahun. Kebijakan reformasi ekonomi era Soeharto yang menyebabkan terjadinya perubahan tata kelola lingkungan di lahan gambut menyebabkan kerusakan ekologis yang masif. Di tingkat lokal pengeringan gambut yang berlangsung terus menerus selama puluhan tahun menyebabkan terjadinya degradasi kualitas ekosistem gambut. Kelompok perempuan yang hidup di tengah kompleksitas tata kuasa dan tata kelola lahan gambut harus menanggung akibat dari program pembangunan yang eksploitatif tersebut.

Berdasarkan interaksinya dengan karhutla gambut, pengalaman para perempuan tidaklah homogen, seperti disampaikan kisah-kisah perempuan dari 3 desa yang berada di kawasan gambut di atas. Interseksionalitas antara gender, kelas ekonomi (pemilik lahan dan penggarap lahan), suku (asli dan pendatang) dan bahkan

lokasi geografis di kawasan gambut (letak tempat tinggal dan lahan) memberikan pengalaman berbeda dalam berinteraksi dengan alam—termasuk bagaimana masing-masing kelompok berusaha mencegah dan menanggulangi bencana karhutla gambut. Mereka alami kerentanan fisik, ekonomi, dan sosial yang berbeda-beda akibat bencana karhutla dan asap yang terjadi di desa mereka. Dengan memahami berbagai pengalaman perempuan yang terdampak karhutla, strategi dan pendekatan yang adil gender dapat dirumuskan untuk mencegah dan menanggulangi bencana karhutla gambut.

Di dalam budaya patriarki, perempuan tidak diposisikan sebagai kelompok yang harus terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla gambut. Pembeneran yang digunakan untuk tidak melibatkan perempuan adalah karena isu ini dipandang memiliki beban berat dan risiko tinggi dan dianggap perempuan tidak mampu. Namun dari penelusuran di tingkat desa, justru perempuan terlibat langsung dalam penanggulangan kebakaran. Terdapat banyak kondisi di mana perempuan merasa harus terlibat. Menutup akses yang dimiliki perempuan atas berbagai sumber daya yang ada untuk mencegah dan menanggulangi karhutla justru merugikan perempuan karena perempuan tidak memiliki pengetahuan tentang peralatan, tidak melindungi dirinya dengan baik dari bahaya karhutla, dan tidak memiliki kendali sama sekali atas berbagai langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menanggulangi karhutla.

Membongkar paradigma yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada peran dan tanggung jawab yang dibedakan secara kaku akan memberi peluang perubahan relasi gender yang lebih cair. Fluiditas peran harus dimungkinkan ketika perubahan ekologi telah berpengaruh pada tatanan gender yang ada di ruang-ruang privat dan publik. Perempuan, dari kelompok-kelompok yang berbeda, seharusnya memiliki ruang untuk dapat menjalankan peran yang beragam dan aman saat terjadi perubahan ekologis yang memengaruhi kehidupannya sehari-hari.

Dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di desa

harus 1) diberi ruang yang setara untuk memperoleh akses atas berbagai sumber daya yang ada; 2) turut berpartisipasi dalam proses-proses perencanaan untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla; 3) memiliki kendali dalam menentukan hal-hal yang akan dilakukan terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla. Dengan demikian, upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat melibatkan dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat yang hidup di dalam ekosistem gambut.

Daftar Pustaka

- Elmhirst, R, Resurreccion, B.P. 2008, *Gender and Natural Resource Management: Livelihoods, Mobility and Interventions*, International Development Research Centre, London.
- Elmhirst, R 2011, "Introducing New Feminist Political Ecologies", *Geoforum* 42(2):129-132.
- Gina, A 2019, "Mia Siscawati: Membaca Kritis Situasi Tata Kuasa dan Tata Kelola Lahan dan Hutan di Wilayah Pedesaan di Indonesia dengan Lensa Ekologi Politik Feminis", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No.4, h. 171 – 184.
- Hardyanto, Y et al. 2020, *Membangun Model Tata Kelola Pengendalian Karhutla Berbasis Multipihak: Studi Kasus Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah*, Kemitraan, Jakarta.
- Indirastuti, C & Pratiwi, AM 2019, "Ketika Lahan Basah Mengering: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No.4, h.92-120.
- Katadata 2019, *Luas Gambut Indonesia Terbesar Kedua di Dunia*, diakses pada 16 Maret 2020, <https://katadata.co.id/infografik/2019/04/29/luas-gambut-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia>
- Pantaugambut.id, *Lahan Gambut Menjaga Perubahan Iklim*, diakses pada 16 Maret 2020, <https://pantaugambut.id/pelajari/peran-penting-lahan-gambut/lahan-gambut-menjaga-perubahan-iklim>.
- Robbins, P 2012, *Political Ecology, Second Edition (Critical Introduction to Geography)*, Wiley-Blackwell, Sussex.
- Rocheleau et al. (ed.) 1996, *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*, Routledge, London

Catatan Akhir

1. *Petak Pelaku* adalah sebidang kebun yang diberikan pada pengantin perempuan sebagai bagian dari mahar perkawinan secara adat.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
2. Dr. Widjajanti Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
3. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
4. Elisabet Kuswijayanti M. Si. (Indonesia)
5. Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Universitas Indonesia)
6. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

